



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN
DI KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Mempawah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

| KABAG HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN TATA PRAJA | SEKDA |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| | | | |

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

| KABAG HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN TATA PRAJA | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1711).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN MEMPAWAH.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

| KABAG HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN TATA PRAJA | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
13. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Mempawah adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Peserta adalah setiap orang yang mendaftar atau didaftarkan untuk ikut serta dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah membayar iuran.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

| KABAG HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN TATA PRAJA | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

16. Pekerja Rentan adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang memiliki resiko sosial-ekonomi yang tinggi, berpenghasilan rendah, rentan terhadap gejolak ekonomi dan literasi mengenai jaminan sosial dibawah rata-rata.
17. Bantuan luran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah kepada pekerja rentan dengan tujuan memberikan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
18. Kartu Peserta Jamsostek disingkat KPJ adalah Identitas Peserta Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diperoleh setelah pembayaran iuran dilakukan yang diberikan kepada Peserta dengan bentuk fisik atau digital sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan Bantuan luran untuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Program JKK dan JKM bagi 100 (seratus) orang pekerja rentan di setiap desa di Kabupaten Mempawah.
- (2) Bantuan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan dianggarkan didalam APBDes.

Pasal 3





Bantuan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kepada Penerima Bantuan luran yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berusia di antara 17 sampai dengan 65 tahun saat didaftarkan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- c. Tidak memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ketika diusulkan;
- d. Belum pernah menerima program Bantuan luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari pemerintah; dan
- e. Termasuk dalam kategori pekerja rentan dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Aktif bekerja secara mandiri berstatus diluar hubungan kerja; dan
 - 2) Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Daerah yang berlaku.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Desa melakukan pendataan kepada masyarakat pekerja di wilayahnya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

| KABAG HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN TATA PRAJA | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- (2) Jumlah kuota Bantuan Iuran yang diberikan adalah sebanyak 100 (seratus) orang secara bergantian untuk setiap desa setiap tahunnya.
- (3) Proses pendataan dilakukan setiap tahun dan diusulkan paling lambat pada bulan Oktober untuk pelaksanaan program tahun berikutnya, dikecualikan untuk pelaksanaan tahun 2023.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara rinci dan jelas mengenai:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Nama Lengkap;
 - c. Tempat Lahir;
 - d. Tanggal Lahir;
 - e. Pekerjaan;
 - f. Nomor Telepon; dan
 - g. Dokumen pendukung.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g adalah:
 - a. KTP, Kartu Keluarga, dan/atau Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. Surat Pernyataan, yang berisi informasi profesi/pekerjaan dan pernyataan rata-rata penghasilan per bulan di bawah Upah Minimum Daerah yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Desa setempat.
- (6) Format rekap hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa melakukan pendataan calon Penerima Bantuan Iuran sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkum untuk selanjutnya ditetapkan berdasarkan Berita Acara melalui Musyawarah Desa.
- (3) Berita Acara Musyawarah Desa yang berisi data calon Penerima Bantuan Iuran disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diverifikasi.
- (4) Hasil verifikasi yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat diusulkan sebagai calon Penerima Bantuan Iuran oleh Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat data yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, BPJS Ketenagakerjaan mengembalikan data kepada Perangkat Desa untuk diajukan usulan pengganti, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengembalian data diterima.
- (6) Usulan pengganti dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah data yang dikembalikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, agar dapat diusulkan kembali sebagai calon Penerima Bantuan Iuran.

| KABAG HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN TATA PRAJA | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Pasal 6

Daftar nama calon Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setempat dan disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat Bulan Desember untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Besaran Iuran

Pasal 7

Iuran JKK dan JKM bagi setiap penerima bantuan adalah sebesar Rp. 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan, atau sama dengan Rp 201.600,- (dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) per orang per tahun.





BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan surat penetapan iuran untuk seluruh usulan calon Penerima Bantuan Iuran dari setiap Desa sesuai dengan Keputusan Kepala Desa yang telah diterbitkan.
- (2) Penetapan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada masing-masing Perangkat Desa untuk dilakukan pembayaran iuran.
- (3) Setelah pembayaran iuran dilakukan, Penerima Bantuan Iuran secara sah mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Program JKK dan JKM.
- (4) Rincian Program Perlindungan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa mengajukan dokumen penyaluran iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa cq. Bidang Pemerintahan Desa setelah APBDesa ditetapkan.
- (2) Dokumen penyaluran biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Desa;
 - b. Rencana Anggaran Biaya; dan
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa cq. Bidang Pemerintahan Desa melakukan inventarisir kelengkapan dokumen penyaluran biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemudian mengajukan persetujuan pembayaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

| KABAG HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN TATA PRAJA | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa cq. Bidang Pemerintahan Desa mengajukan permintaan pembayaran beserta dokumen penyaluran biaya iuran kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (6) Pemerintah Desa melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan setelah dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima di Rekening Kas Desa.

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan tanda bukti kepesertaan berupa KPJ yang berbentuk fisik/digital untuk seluruh Penerima Bantuan Iuran.
- (2) KPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan ke seluruh Perangkat Desa untuk diserahkan kepada masing-masing Penerima Bantuan Iuran.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi kepada Penerima Bantuan Iuran di setiap Desa mengenai pelaksanaan dan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Bantuan Iuran berupa uang dicatat sebagai realisasi belanja Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam tahun anggaran berkenaan.





Pasal 12

Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah yang membidangi pemerintah desa, perencanaan, keuangan, pengawasan, hukum, ketenagakerjaan, dan perangkat daerah terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi tentang Pelaksanaan Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan tahun berkenaan, serta Rekomendasi pelaksanaan program tersebut untuk tahun berikutnya.

| KABAG HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMFAKARSA | ASISTEN TATA PRAJA | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Pasal 14

Tim monitoring dan evaluasi melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat Penerima Bantuan Iuran yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dan/atau bukan akibat kecelakaan kerja sebelum periode perlindungan memasuki bulan ke-12 (dua belas), Perangkat Desa dapat mengajukan pengembalian iuran yang tersisa kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengembalian iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada rekening penyetor iuran, dalam hal ini adalah rekening Kas Desa yang bersangkutan.
- (3) Proses pengembalian iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pencairan santunan JKM kepada ahli waris penerima bantuan.
- (4) Iuran sisa yang telah masuk ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan kembali sebagai iuran perlindungan, untuk calon Penerima Bantuan Iuran pengganti dari Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25-1-2023

BUPATI MEMPAWAH

BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-1-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100
PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN
MEMPAWAH

Contoh Format Rekap Hasil Pendataan Calon Penerima Bantuan Iuran

REKAP HASIL PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN IURAN
GERAKAN PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN TAHUN 2023

| No. | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Pekerjaan 1 | Pekerjaan 2 | No HP |
|-----|-----|------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | | | | | | | |

Keterangan:

- Data NIK, Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir diisi sesuai KTP
- Penulisan nama pekerjaan harus spesifik, seperti: Nelayan, Pemulung, Peternak, Tukang / Buruh Cuci, Tukang / Buruh Bangunan, dan sejenisnya.
- Tidak menuliskan nama pekerjaan umum dan tidak spesifik, seperti: Buruh / Pekerja Lepas, Buruh / Pekerja Harian, Wiraswasta, dan sejenisnya

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-1-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 3

BUPATI MEMPAWAH,

ERLIN A

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PERLINDUNGAN 1
DESA 100 PEKERJA RENTAN DI
KABUPATEN MEMPAWAH

Contoh Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat & Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor Telepon (HP) :

dengan ini menyatakan bahwa saya bekerja/berprofesi sebagai
.....
dan berpenghasilan rata-rata setiap bulannya di bawah UMK Mempawah
Tahun 2023 sebesar Rp 2.608.601,75.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat
diajukan sebagai penerima bantuan iuran dalam Program Perlindungan
1 Desa 100 Pekerja Rentan.

Mempawah, 2023

Yang menyatakan,

(Nama Lengkap)

BUPATI MEMPAWAH
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-1-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PERLINDUNGAN
1 DESA 100 PEKERJA RENTAN DI
KABUPATEN MEMPAWAH

PERHITUNGAN PREMI IURAN DAN MANFAAT PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN :

1. Besaran iuran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Rentan adalah sebagai berikut :

(Asumsi menggunakan batas laporan penghasilan terendah sebesar Rp 1.000.000,-)

- Jaminan Kecelakaan Kerja: $1\% \times \text{Penghasilan}$: Rp. 10.000
- Jaminan Kematian : iuran Tetap Rp 6.800 : Rp. 6.800
- Total : Rp. 16.800

2. Adapun manfaat perlindungan yang akan diperoleh peserta dan keluarga apabila terjadi resiko kecelakaan kerja dan kematian adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Program ini memberikan manfaat kepada tenaga kerja dan keluarga seperti :

- Biaya Pengangkutan (Maksimum)
 - Darat/sungai/danau : Rp. 5.000.000,-
 - Laut : Rp. 2.000.000,-
 - Udara : Rp. 10.000.000,-
- Biaya Pengobatan dan perawatan
Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya.
- Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
 - Dua Belas (12) bulan : $100\% \times \text{penghasilan pertama}$
 - Selanjutnya (hingga sembuh) : $50\% \times \text{penghasilan}$
- Penggantian gigi tiruan : Rp. 5.000.000,- (maksimum)
- Penggantian Alat Bantu Dengar : Rp. 2.500.000,- (maksimum)
- Penggantian Biaya Kacamata : Rp. 1.000.000,- (maksimum)
- Layanan Homecare (Diberikan paling lama 1 Tahun) : Rp. 20.000.000,- (maksimum)

- Santunan Cacat
 - Cacat sebagian Anatomis : % table x 80 x penghasilan
 - Cacat Total Tetap : 70% x 80 x penghasilan
 - Cacat sebagian fungsi : % kurang fungsi x % table x 80 x penghasilan
- Santuan Kematian Karena Kecelakaan Kerja
 - Santunan Kematian : 60% x 80 penghasilan
 - Santunan Berkala : Rp. 500.000,- (24 Bulan)
 - Biaya Pemakaman : Rp. 10.000.000,-
- Biaya Rehabilitasi

Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- Bantuan Beasiswa

Bantuan beasiswa kepada 2 (dua) anak peserta yang masih sekolah untuk setiap peserta, apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja,

 - TK s/d SD : Rp. 1.500.000,- /Tahun/Anak
 - SMP : Rp. 2.000.000,- /Tahun/Anak
 - SMA : Rp. 3.000.000,- /Tahun/Anak
 - Perguruan Tinggi (PT) : Rp.12.000.000,- /Tahun/Anak
- Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)

Tujuan dibentuknya Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) adalah agar peserta dapat lebih mudah menjangkau rumah sakit/klinik dan mempermudah administrasi pada saat terjadi kecelakaan kerja sehingga penanganan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditangani secara tepat dan tepat.

b. Manfaat Jaminan Kematian (JKM)

Program Jaminan Kematian (JKM) diperuntukan bagi ahli waris pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKM diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti :

- Santuan Kematian Rp. 20.000.000,-
- Santuan Berkala Rp. 500.000,-/bulan (selama 24 bulan) diambil sekaligus.
- Biaya Pemakaman Rp. 10.000.000,-
- Bantuan Beasiswa kepada 2 (dua) anak peserta yang masih sekolah untuk setiap peserta, apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling lama 3 (tiga) tahun

TK s/d SD : Rp. 1.500.000,- /Tahun/ Anak
SMP : Rp. 2.000.000,- /Tahun/ Anak
SMA : Rp. 3.000.000,- /Tahun/ Anak
Perguruan Tinggi (PT) : Rp. 12.000.000,- /Tahun/ Anak

 KABUPATEN MEMPAWAH

 DALINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25/1/2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

 ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 3